

PEMBENTUKAN KARAKTER WARGA NEGARA DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI WARGA NEGARA DI ERA DIGITAL

Feriyansyah¹

Abstract

Digital era is a new term used to describe the information and technology embraces in all aspect of lifes. Study on digital citizenship provides the influences of internet in humankind life. Furthermore, Improvement in fostering technology is needed to enhance the learning method in addressing the citizenship education. This article mentions that participation of citizen in developmental programs of government must be respected and engaged in appropriate ways. This article also stresses that citizen and government must be interlinked with the others supported by technology in order to foster good participation.

Key words: digital citizenship, participation, citizenship education.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menghadirkan peluang dan keuntungan bagi kehidupan warganegara khususnya dalam praktik kewarganegaraan. Untuk mengoptimalkan kemajuan TIK bagi kehidupan warga negara, maka warga negara harus memiliki karakteristik dan kompetensi di era digital. Selain itu, pemerintah juga harus menyesuaikan dengan perubahan agar terjalin sinkronisasi antara pemerintah dan warga negara. Hemat penulis, karakteristik warga negara digital dan karakteristik pemerintah di era digital memiliki hubungan erat karena keduanya merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan peluang dan keuntungan dari kemajuan TIK.

¹Penulis adalah Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan (Unimed).
Email: feriansyach@gmail.com.

Masyarakat harus dapat menjadi masyarakat pembelajar agar mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya. Oleh karena itu, perlu mempersiapkan warga negara yang merupakan generasi digital agar dapat menjadi warga negara digital. Hal ini dikarenakan suatu bangsa harus pandai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya saingnya di antara bangsa-bangsa lain.²

Kewarganegaraan Digital

Era digital telah membentuk warga negara digital yang dalam kehidupan sehari-hari terbiasa menggunakan internet sebagai sebuah kebutuhan. Istilah warga negara digital telah digunakan oleh Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert dan Ramona S. Mcneal dalam bukunya yang berjudul *Digital Citizenship: the Internet, Society, and Participation*.

Warga negara digital didefinisikan (*digital citizen*) are those who use technology frequently, who use technology for political information to fulfill their civic duty, and who use technology at work for economic gain.³ Oleh karena itu, konsep warga negara digital yang cerdas dan baik merupakan konsep yang ideal sebagai seorang warga negara hidup di era digital. Warga negara digital yang cerdas dan baik tercermin melalui perilaku cerdas dan baik ketika beraktifitas di masyarakat dalam jaringan (*Online Community*). Perilaku warga negara digital yang cerdas dan baik menjadi kunci utama agar seorang warga negara dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan digital. Ketika warga negara digital tidak cerdas dan tidak baik dalam beraktifitas maka akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dalam jaringan.

²Samaun Samadikun, "Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer; Telekomunikasi dan Informasi," dalam *Indonesia Abad XXI: Di tengah Kepungan Perubahan Global* (Jakarta: Kompas, 2000), halaman 293.

³Karen Mossberger, Caroline J. Tolber and Ramona S. McNeal, *Digital Citizenship* (London, England: the MIT Press Cambridge, 2008). Dalam buku ini diberikan definisi tentang Warga negara digital merupakan warga negara yang terbiasa menggunakan TIK untuk mendapatkan informasi politik demi memenuhi kewajiban sebagai warga negara serta mereka yang menggunakan teknologi dalam pekerjaannya untuk tujuan ekonomi. Jadi, Kebutuhan akses internet bagi warga negara merupakan hal yang fundamental.

Feriyansyah: Pembentukan Karakter Warga Negara Digital

Kemajuan TIK telah memengaruhi bagaimana pola komunikasi yang terbangun antara warga negara dengan negara (pemerintah). Kemajuan TIK telah menciptakan suatu ruang baru yang dapat menghubungkan antara warga negara dan negara yang tidak terbatas waktu dan ruang.

Jika kita lihat fenomena saat ini, elit politik seperti presiden, menteri, gubernur, walikota sudah mulai memanfaatkan akun sosial media sebagai wadah membangun komunikasi dengan warga negara. Walikota Bandung misalnya, memerintahkan kepada seluruh perangkat pemerintahan, seluruh dinas dan camat di lingkungan pemerintah Kota Bandung agar memiliki akun *twitter* agar dapat menjangkau dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Walikota Bandung memang telah memiliki akun *twitter*, bahkan sang walikota sering terlibat komunikasi aktif dengan warga di dalam sosial media. Warga sering menyampaikan berbagai laporan, harapan, masukan kepada Pemerintah Kota Bandung.

Aktivitas ini merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara di era digital. Pola komunikasi dengan memanfaatkan TIK akan menciptakan pemerintahan kota Bandung yang efektif dalam menjangkau aspirasi dan aduan dari masyarakat. Komunikasi yang terjalin antara warga negara dan pemerintah dalam sosial media merupakan contoh dari praktik kewarganegaraan baru di era digital, serta wadah baru bagi warga negara dalam berpartisipasi. Dengan hadirnya teknologi internet yang tanpa batas (*borderless*), Kekakuan birokrasi yang sudah berurat dan berakar perlahan tapi pasti mulai bisa dicairkan.⁴

Interaksi antar individu dalam dunia digital akan membentuk norma-norma untuk mengatur kehidupan warga negara digital ketika beraktifitas. Oleh karena itu dalam kehidupan dalam masyarakat digital dibutuhkan seperangkat karakter yang melekat pada warga negara digital sebagai standar perilaku bagi warga negara digital. Istilah kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) merupakan konsep yang mendeskripsikan bagaimana karakter warga negara digital yang cerdas dan baik.

Istilah kewarganegaraan digital terbentuk dari dua kata yaitu kewarganegaraan dan digital. Kewarganegaraan dimaknakan sebagai,

⁴Ridwan Kamil, #Tetot: *Aku Kamu dan Media Sosial* (Bandung: Penerbit Sygma, 2014).

a set of characteristic of being a citizen...⁵ Adapun digital citizenship is a concept which helps teachers, technology leaders and parents to understand what students/ young people/technology users should know to use technology appropriately. Digital Citizenship is more than just a teaching tool; it is a way to prepare students/technology users for a society full of technology.⁶

Kewarganegaraan digital menjadi isu yang aktual dalam kajian kewarganegaraan, terutama dalam hal bagaimana menanamkan karakter warga negara agar menjadi warga negara digital yang cerdas dan baik serta bijaksana dalam menggunakan teknologi terutama kemajuan bidang TIK.

Pendidikan Keanggotaan (PKn) diharapkan dapat mengambil peran yang strategis untuk juga mempersiapkan warga negara muda menghadapi kehidupan digital yang akan datang. Oleh karena itu program PKn, baik di sekolah maupun masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan warga negara digital yang cerdas dan baik (*the smart and good digital citizen*). Warga negara di Abad 21 diharapkan menjadi "*civic learner*" (warga negara pembelajar) melalui pengembangan kecerdasan belajar. Globalisasi dan kemajuan teknologi menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh warga negara. Sehingga perlu pengembangan kecerdasan teknologi dari warga negara sebagai sebuah pegangan dan pemahaman bagi warga negara untuk bagaimana hidup dalam era digital.

Karakter Warga Negara Digital

Agar dapat mengoptimalkan peluang dan keuntungan kemajuan TIK, maka warga negara harus dipersiapkan agar mampu berkontribusi dalam masyarakat digital, sehingga warga negara harus dibekali karakteristik dan keterampilan hidup di era digital. Oleh karena itu, PKn sebagai sebuah program mempersiapkan warga negara harus menyadari perubahan kondisi masyarakat akibat dari kemajuan TIK untuk mempersiapkan warga negara muda untuk memasuki masyarakat digital, sebagaimana yang diungkapkan oleh

⁵Abdul Azis Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: Alfabeta, 2011), halaman 23.

⁶http://www.oaesv.org/wp-content/uploads/2013/02/Fostering_Digital_Citizenship.pdf di akses pada 12 Desember 2013 01:56 WIB)

Feriyansyah: Pembentukan Karakter Warga Negara Digital

David Kerr, *citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.*⁷

Oleh karena itu, ketika kemajuan TIK telah memindahkan beberapa praktik kewarganegaraan ke dalam jaringan. Sesungguhnya kemajuan TIK telah mengantarkan warga negara di era informasi dan mengubah pola komunikasi warga negara dengan pemerintah (pengelola negara). PKn berbasis pembentukan karakter digital merupakan sebuah proses mempersiapkan warga negara muda untuk mampu mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara di era digital.

Program PKn di era digital mampu menghadirkan di masa yang akan datang warga negara yang memiliki karakteristik abad 21 (era digital) yang berbasis kepada keterbukaan informasi dengan berbagai dukungan kemajuan teknologi. PKn - visi, kurikulum dan pembelajaran abad 21 – pada dasarnya terpusat pada pengembangan “*learning intelligence*” dalam dimensi-dimensi “*social, cultural, political, economic, and technological intelligences ...*”⁸

Warga negara di abad 21 adalah warga negara pembelajar, sehingga warga negara harus memiliki kecerdasan belajar (*learning intelligences*). Kecerdasan belajar tersebut meliputi beberapa dimensi yaitu warga negara harus memiliki kecerdasan sosial, kecerdasan budaya, kecerdasan politik, kecerdasan ekonomi, dan kecerdasan teknologi. Kelima dimensi kecerdasan ini harus dipersiapkan agar warga negara mampu berkontribusi di abad 21 yang ditandai dengan kemajuan TIK.

Oleh karena itu, warga negara di Abad 21 diharapkan menjadi warga negara pembelajar (*civic learner*) dengan pengembangan kecerdasan belajar warga negara. Dari ruang lingkup tujuannya, program PKn tidak hanya bisa dilihat dari demokrasi politik saja, tetapi harus dilihat hubungannya satu sama lain secara

⁷David Kerr, *Citizenship Education: An International Comparison* (England: National Foundation for Educational Research-NFER, 1999), halaman 2.

⁸Udin S. Winataputra. dan Dasim Budimansyah, *Civic Education : Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas* (Bandung: SPS UPI Bandung, 2007), halaman 3.

interdisipliner dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, bahkan dengan agama, sains, dan teknologi. Hal ini untuk memungkinkan program PKn dapat menarik pengaruh positif dari ilmu-ilmu tersebut yang erat hubungannya dengan upaya menumbuhkan warga negara yang baik.⁹

Kajian PKn selain mengembangkan kajiannya tentang hubungan warga negara dengan negara, hubungan warga negara dengan warga negara yang lain, juga mengembangkan kajian tentang hubungan warga negara dengan perubahan budaya, warga negara dengan kemajuan teknologi. Kajian teknologi merupakan salah hal penting dalam program PKn karena teknologi telah merubah kondisi masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan budaya, mengubah geopolitik, serta merubah praktik-praktik kewarganegaraan. Akhirnya, PKn akan menjadi sarana mempersiapkan warga negara yang mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan partisipasi warga negara. Subjek penelitian memberikan beberapa karakteristik yang perlu dibentuk dalam diri seorang warga negara digital yaitu:

- 1) Warga negara yang melek TIK
- 2) Warga negara yang memahami etika dalam TIK
- 3) Warga negara yang memiliki kecerdasan berteknologi
- 4) Warga negara yang mampu berpikir kritis dan solutif
- 5) Warga negara yang komunikatif
- 6) Warga negara yang mampu berkolaborasi
- 7) Warga negarapembelajar (*learning intelligences*)
- 8) Warga yang memiliki nilai dasar yang kuat

Warga negara digital terbiasa menggunakan TIK dalam berbagai aktivitas, bahkan aktivitas kewarganegaraan sehingga warga negara harus memiliki kecerdasan teknologi (*technological intelligence*). Selain itu, warga negara digital harus memahami tentang etika dalam menggunakan TIK. Teknologi digital telah merambah seluruh kehidupan, seluruh perangkat pendukung kehidupan manusia telah menggunakan teknologi digital. Salah satu

⁹M. Nu'man Somantri, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (Bandung: Program Pascasarjana UPI dan FPIPS UPI dengan PT Remaja Rosdakarya, 2007), halaman 291.

Feriyansyah: Pembentukan Karakter Warga Negara Digital

kemampuan yang harus dikuasai oleh masyarakat adalah keterampilan komputer.¹⁰

Selain itu, warga negara digital diharapkan menjadi warga negara yang otonom di tengah-tengah kondisi obesitas informasi, Kondisi seperti ini mengharuskan warga negara digital memiliki kemampuan **berpikir tingkat tinggi dengan berpikir kritis**. Warga negara yang otonom tidak mudah dimobilisasi oleh informasi yang memapar, kemampuan berpikir kritis harus dilandasi dengan nilai dasar yang kuat dalam diri warga negara digital. Warga negara digital membutuhkan **keterampilan komunikasi** agar mereka benar-benar mampu memberikan dan mengelola informasi secara **bijak dan bertanggung jawab**. Keterampilan berkomunikasi yang baik merupakan salah satu karakteristik yang harus ditanamkan kepada warga negara digital. Selanjutnya, warga negara digital harus memiliki **kemampuan berkolaborasi** untuk menghadapi masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan berkolaborasi dapat membantu siswa atau mahasiswa berempati kepada orang-orang dari kultur yang berbeda.¹¹

Informasi yang *up to date* menjadikan warga negara harus terbiasa memperbaharui pengetahuannya dengan memiliki kecerdasan belajar (*Learning intelligences*). Oleh karena itu warga negara digital harus menjadi **warga negara pembelajar**. Di Era digital Informasi sangat dinamis maka pengetahuan warga negara juga harus dinamis agar mampu berkontribusi dalam masyarakat digital yang berpikir tingkat tinggi dan cepat.

Warga negara di era digital harus **dilandasi oleh nilai dasar yang kuat**. Karena nilai dasar ini akan menjadi pijakan bagi warga dalam mengambil sikap dan perilaku. Dalam hal ini nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi nilai dasar dalam pembentukan warga negara digital. Nilai-nilai Pancasila harus benar-benar tertanam dalam diri warga negara digital di Indonesia. Warga negara harus tetap berkontribusi ditengah arus informasi global yang pastinya juga banyak benutran nilai-nilai didalamnya. Tidak dapat

¹⁰Ace Suryadi, *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Bandung:: Widya Aksara Press, 2009), halaman 132.

¹¹Don Tapscott, *Grown Up Digital: Yang Muda Yang Mengubah Dunia*. Diterjemahkan oleh Fajarianto (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), halaman 198..

dipungkiri bahwa kemajuan di bidang teknologi atau IPTEK hendaknya diimbangi dengan IMTAQ yang teguh.¹²

Net Safe memberikan karakteristik dari warga negara digital sebagai berikut:

- 1) *A confident and capable user of ICT*
- 2) *Uses technologies to participate in educational, cultural, and economic activities*
- 3) *Uses and develops critical thinking skills in cyberspace*
- 4) *Literates in the language, symbols, and texts of digital technologies*
- 5) *Aware of ICT challenges and can manage them effectively*
- 6) *Uses ICT to relate to others in positive, meaningful ways*
- 7) *Demonstrates honesty and integrity and ethical behaviour in their use of ICT*
- 8) *Respects the concepts of privacy and freedom of speech in a digital world*
- 9) *Contributes and actively promotes the values of digital citizenship*¹³

Pada akhirnya seorang warga negara digital merupakan **pertama, warga negara digital merupakan seseorang terbiasa dan cakap menggunakan TIK**. Dalam hal ini akses terhadap teknologi baik peralatan maupun jaringan menjadi hal yang harus diberikan oleh pemerintah. Hal ini pastinya akan berkaitan erat dengan tingkat ekonomi warga negara. Pada akhirnya golongan masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap kemajuan TIK. Oleh karena itu, untuk pemerintah sesuai dengan UUDNRI Tahun 1945 harus bertanggung jawab memenuhi hak siswa (warga negara muda) untuk mendapatkan akses terhadap teknologi digital. Pemberian akses ini juga harus diberikan juga keterampilan untuk cakap penggunaan dan tentunya dilandasi pemahaman tentang etika TIK.

¹²Deni Darmawan, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), halaman 284.

¹³http://www.netsafe.org.nz/Doc_Library/Digital_Citizenship_in_New_Zealand_Schools_Overview.pdf diakses pada 5 September 2013 pukul 16:06 WIB).

Feriyansyah: Pembentukan Karakter Warga Negara Digital

Kedua, menggunakan teknologi untuk berpartisipasi dalam pendidikan, budaya dan aktifitas ekonomi; kemajuan TIK akan meningkatkan partisipasi warga negara. Bidang pendidikan di bidang TIK harus menjadi tempat untuk mempersiapkan warga negara muda memasuki kehidupan digital dengan mengajarkan peluang, kesempatan dan karakteristik yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat berkontribusi dalam lingkungan digital.

Ketiga, warga negara digital terbiasa menggunakan dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam ruang siber (cyberspace). Ruang siber (*cyber spaces*) merupakan ruang dimana informasi terbuka bagi orang yang mengaksesnya. Informasi berasal dari mana saja dari timur maupun dari barat. Berisi kebenaran dan kebohongan dan berbagai bentuk informasi. Informasi ini sedikit banyak akan memapar warga negara di era digital. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan berpikir kritis untuk mampu menganalisis dan mengolah informasi menjadi sebuah pengetahuan. Dalam proses ini warga negara digital harus memiliki nilai dasar yang kuat sebagai landasan berpikir.

Keempat, berpikir kritis di sini juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi warga negara digital dalam kehidupan kewarganegaraannya. Proses berpikir kritis ini pasti akan menghasilkan solusi bagi suatu permasalahan yang ada di lingkungan. Pemerintah di era digital harus mampu memanfaatkan ini sebagai sumber data untuk mengambil kebijakan. Warga negara digital akan menjadi mitra utama bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Pada akhirnya negara harus mempersiapkan warga negara di era digital agar mampu menjadi mitra utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang terbuka di era digital. Hal ini juga sesuai dengan temuan penelitian bahwa, warga negara digital harus mampu memilah dan memilih informasi di era keterbukaan informasi. Kecerdasan memilah dan memilih informasi ini harus didukung dengan literasi informasi warga negara.

Kelima, memiliki literasi bahasa, simbol dan teks dalam teknologi digital. Hal ini bisa disamakan dengan temuan penelitian bahwa dalam menyampaikan ide dan gagasan di dunia digital maka seorang warga negara harus memiliki kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang baik harus dilandasi oleh literasi bahasa. Menyampaikan ide gagasan dan bahkan aspirasi di dunia digital bukan lagi secara verbal bahkan akan berdiskusi secara tulisan. Oleh karena

itu, kemampuan berbahasa ini juga penting agar warga negara digital dapat secara optimal berkontribusi di era digital.

Keenam, memiliki kesadaran tantangan TIK dan dapat mengatur diri mereka secara efektif; Kemajuan Tik telah memberikan tantangan tersendiri bagi warga negara untuk dapat mengoptimalkan keuntungan dan peluang yang bisa di dapatkan. Selain itu, warga negara digital diharapkan mampu mengatur diri mereka ketika

Ketujuh, menggunakan TIK untuk berhubungan secara positif dengan orang lain, dengan cara-cara berarti/ bermakna; TIK telah melahirkan ruang sosial baru bagi warga negara. Kemajuan TIK juga melahirkan bentuk-bentuk baru dalam aktivitas sosial. Warga negara digital harus mampu menjalin hubungan secara positif dengan orang lain. Sehingga, kehidupan sosial di dunia maya juga membutuhkan nilai-nilai untuk mengatur berbagai aktivitas disana.

Kedelapan, menunjukkan perilaku jujur dan integritas serta beretika dalam menggunakan TIK; warga negara digital diharapkan memiliki integritas yang tinggi. Kejujuran harus menjadi karakter yang melekat dalam diri seorang warga negara digital. Kejujuran dan integritas sangat membantu mengoptimalkan keuntungan dan peluang dari kemajuan Tik karena sangat membantu menghindari plagiarisme dalam dunia digital serta menghargai karya orang lain., sebagaimana yang ditemukan oleh Morgan bahwa *the highlighted problems and challenges are merely an overview of the issues relating to identity, veracity, and ownership in the digital age.*¹⁴ Masalah dan tantangan yang disorot hanyalah gambaran dari masalah yang berkaitan dengan identitas, kejujuran, dan kepemilikan di era digital. Kejujuran akan bisa meningkatkan kepercayaan (*trust*) dalam masyarakat digital.

Kesembilan, respek terhadap konsep privasi dan kebebasan berbicara dalam dunia digital. Kemajuan TIK telah menghadirkan ruang kebebasan berbicara bagi warga negara. Tetapi, kebebasan berbicara ini juga harus dilandasi dengan tanggung jawab.

¹⁴Kanred Morgan dan Medeleine Morgan, "Ethical Issues in Digital Information Technology," dalam Thomas Hansson (Ed.). *Handbook of Research Digital Information Technologiest, Innovation and Ethical Issues* (New York, USA: Information Science Reference, 2008), halaman 447-456.

Feriyansyah: Pembentukan Karakter Warga Negara Digital

Kesepuluh, berkontribusi dan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai Kewarganegaraan Digital (Digital Citizenship).

Microsoft Fostering memberikan penjelasan tentang alasan mengapa harus mengembangkan kewarganegaraan digital yaitu:

(1) Today's young people are navigating a new digital culture in which the rules and social norms are sometimes unclear. They must learn about digital citizenship and develop a sense of ownership and personal responsibility to make good, ethical decisions in the online world; (2) the online world presents great opportunities for young people, but it is not without risks. We can mitigate some of those risks by helping young people develop a strong sense of digital citizenship; (3) rather than relying solely on protective measures, an approach to online safety that includes digital citizenship will help young people safely interact in the online world. Teaching them about digital literacy and digital ethics and etiquette is no longer merely an option; it is an imperative¹⁵

Agar warga negara mampu mengoptimalkan peluang dan keuntungan digital maka warga negara harus dipersiapkan dengan digital literasi. ***Digital literacy or the ability to understand and fully participate in the digital world is fundamental to digital citizenship. It is the combination of technical and social skills that enable a person to be successful and safe in the information age. Like literacy and numeracy initiatives which provide people with the skills to participate in the work force, digital literacy has become an essential skill to be a confident, connected, and actively involved life long learner.¹⁶***

Literasi Digital atau kemampuan untuk memahami dan berpartisipasi penuh dalam dunia digital merupakan asas (*fundamental*) dari kewarganegaraan digital. Hal ini merupakan kombinasi dari keterampilan teknis dan sosial yang memungkinkan seseorang sukses (berhasil) dan selamat dalam era informasi seperti literasi (kemelekan) dan numerasi (kemelekan matematika) inisiatif

¹⁵Lihat http://www.oaesv.org/wp-content/uploads/2013/02/Fostering_Digital_Citizenship.pdf di akses pada 12 Desember 2013 01:56 WIB).

¹⁶http://www.netsafe.org.nz/Doc_Library/Digital_Citizenship_in_New_Zealand_Schools_Overview.pdf diakses pada 5 September 2013 pukul 16:06 WIB.

menyediakan orang-orang dengan keterampilan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja (*work force*). Literasi digital telah menjadi keterampilan yang esensial (yang dibutuhkan) untuk terlibat secara percaya diri (yakin), terhubung, dan aktif sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat (*life long learner*). Program komputer literasi akan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia kita mampu bersaing di era digital. Kemelakaan digital harus ditumbuhkan dalam diri seorang warga negara, kemelakan digital merupakan kunci agar warga negara dapat terlibat dalam mayarakat digital.

Selain itu ada juga istilah literasi media yang juga dibutuhkan oleh seorang warga negara digital. oleh karena, itu PKn harus memberikan pengalaman untuk menumbuhkan literasi media. *These media literacy learning opportunities appeared to have a positive impact on civic engagement, even with controls for political intrest and prior levels of online activity..this supprotthe idea that as youth have opportunities to learn how to engage online, they become more likely to do so*, demikian tegas Kahne.¹⁷

Warga negara digital terbentuk dari literasi digital, kemampuan digital (*digital capable*), keterampilan keamanan cyber (*cybersafety skills*) dan kurikulum, yaitu nilai dan kompetensi inti dalam kurikulum. Sehingga jika diadopsi di Indonesia kurikulum 2013 harus mampu membentuk warga negara digital sebagai sebuah kebutuhan agar warga negara dapat berkontribusi di dunia digital yang pada akhirnya mendapatkan manfaat dari berkontribusi dalam dunia digital. Kemampuan literasi digital akan meningkatkan produktivitas diri dari warganegara, hal ini berkesinambungan dengan terbentuknya karakter dari etos kerja yang positif, menumbuhkan sikap profesional

Pada akhirnya mengajari mereka tentang **literasi digital dan etika digital** merupakan suatu hal yang harus diberikan dalam mendidik warga negara di era digital. Tetapi jangan sampai hal ini menjadi hal yang abstrak. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan siswa. Atas dasar batasan itulah maka pelajaran

¹⁷Joseph Kahne, Jacqueline Ullman dan Middaugh. "Digital Opportunity for Civic Edcation," dalam David E. Campbell, et.al (Ed.), *Civic Count: Citizenship Education for a New Generation* (Cambridge, England: Harvad Education Press, 2012).

Feriyansyah: Pembentukan Karakter Warga Negara Digital

PKn harus mengenai sasaran kebutuhan para siswa. Kahne juga menegaskan, *ways on line participation and media literacy education may influence both online and offline civic activity and development*.¹⁸ Partisipasi warga negara dalam jaringan (*on-line*) dan pendidikan literasi media mungkin akan mempengaruhi masing-masing aktivitas warga negara baik secara *online* dan *offline* serta akan mengembangkannya.

Oleh karena itu, kemajuan TIK harus disadari oleh pendidik kewarganegaraan karena mereka memiliki peran yang cukup strategis dalam mempersiapkan warga negara agar cerdas dan bijak beraktivitas di dunia digital. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam perubahan sosial termasuk PKn melalui mana pengetahuan ditransmisikan. Oleh karena itu, Pendidikan pada umumnya dan PKn pada khususnya dihadapkan kepada implikasi-implikasi perubahan ini, khususnya dalam hubungannya dengan kehidupan yang semakin mengglobal yang telah membentuk dan mempertajam kultur-kultur pengajaran (*teaching*) dan pembelajaran (*learning*).¹⁹

PKn mempersiapkan warga negara di era informasi agar menjadi warga negara yang cerdas dan bijak serta mampu berkontribusi dalam era informasi saat ini. Teknologi informasi hanyalah alat bantu. Faktor manusia akan sangat menentukan kebaikan teknologi tersebut terutama untuk beramal sebanyak mungkin umat manusia.²⁰ Warga negara harus dipersiapkan karakteristik sebagai warga negara digital agar mampu menghadirkan kebaikan ketika menggunakan TIK.

Pada akhirnya, karakteristik warga negara digital sebagai usaha untuk dapat mengoptimalkan keuntungan dan peluang dari kemajuan TIK bagi kehidupan warga negara. Di sinilah peran PKn di era digital untuk mempersiapkan warga negara muda karena mereka hidup dalam kondisi yang berubah akibat dari kemajuan TIK. Pelajaran PKn harus mengenai sasaran kebutuhan para siswa.

¹⁸*Ibid.*, halaman 212.

¹⁹Freedy K. Karlidjernih, *Puspa Ragam, Konsep dan Isu Kewarganegaraan* (Bandung: Widya Aksara Press; Edisi ketiga, 2011).

²⁰Ono W Purbo, "Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia," dalam *Indonesia Abad XXI: di Tengah kepingan Perubahan Global* (Jakarta: :Kompas, 2010).

Mereka jangan terlalu banyak diberi hal-hal yang terlalu abstrak, tetapi hal-hal yang nyata dan berguna bagi kehidupan sehari-hari, tanpa mengurangi tujuan idealnya²¹ sehingga PKn harus mempersiapkan warga negara sesuai dengan kebutuhan mereka untuk dapat berkontribusi dalam masyarakat informasi dan masyarakat digital.

Menarik melihat penelitian yang dilakukan oleh Katherine Lewis ketika melaporkan hasil penelitiannya pada 13 SD di Jepang bahwa dari seluruh tujuan dan sasaran pembelajarannya hanya 12% yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Sisanya mencakup kemampuan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi dan sosial. Saat ini pengembangan pribadi yaitu mempersiapkan warga negara dengan seperangkat karakter yang baik untuk hidup di era digital. Upaya mengembangkan kecerdasan sosial agar siswa memahami kondisi sosial mereka yang pastinya berbeda dengan kondisi yang dialami oleh orang tua dan guru mereka, sehingga pendidikan harus senantiasa memahami perubahan kondisi lingkungan karena lingkungan akan menjadi tempat siswa berkontribusi sebagai anggota masyarakat di masa yang akan datang.

Oleh karena itu kembali bahwa ada keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang warga negara yang hidup di era digital. Kahne mengatakan, *which have been found to provide youth with opportunities to develop both civic skill and productive norms of behavior within social networks and organizations.*²² Untuk menyediakan bagi generasi muda kesempatan untuk mengembangkan yaitu keterampilan warga negara (*civic skill*) dan menghasilkan norma-norma dari perilaku dengan jaringan kerja (*network*) sosial dan organisasi. Pendidik harus kreatif untuk dapat mengambil manfaat dari keterlibatan generasi muda dengan media digital untuk meningkatkan keterlibatan dan pengembangan dalam bidang kewarganegaraan dan politik, sekarang tinggal kemampuan pendidik untuk dapat berinovasi dalam pembelajaran PKn.

Joseph dan Ullman memberikan lima rekomendasi kebijakan yang harus diambil negara untuk dapat mengoptimalkan keuntungan dan peluang dari kemajuan TIK bagi kehidupan warga negara yaitu:

²¹M. Nu'man Somantri. *op. cit.*, halaman 299.

²²Joseph Kahne Jacqueline Ullman dan Middaugh. *op. cit.*, halaman 209.

Feriyansyah: Pembentukan Karakter Warga Negara Digital

1. *Promote media literacy*
2. *Close the digital divide and participation gap*
3. *Promote out-of school opportunities Along with in-school ones*
4. *Fund the development of digital civic infrastucture*
5. *Conduct relevant assessments.*²³

Untuk mengoptimalkan kesempatan dari media digital ada lima rekomendasi yang dapat diambil yaitu: *pertama*, mempromosikan literasi media; *kedua*, menekan jurang *digital divide* dan partisipasi; *ketiga*, mempromosikan peluang di luar dan dalam sekolah; *keempat*, membiayai pengembangan infrastuktur untuk warga negara digital; *kelima*, melakukan asesmen yang relevan. Pemerintah mampu melindungi, menjamin dan mendukung bagaimana praktisidan teknolog serta masyarakat pada umumnya untuk lebih mampu memanfaatkan dan merasakan dampak positif dalam memajukan kehidupannya.²⁴ Warga negara digital dapat meningkatkan eksistensinya tidak hanya muncul dari kalangan ekonomi menengah ke atas, tetapi merata setiap siswa di Indonesia merasakan pengalaman menggunakan TIK dalam beraktivitas kewarganegaraan. Kebijakan yang paling mungkin adalah, meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah.

Kita dapat mencontoh negara China dalam memanfaatkan kemajuan TIK bagi peningkatan kualitas kehidupan kewarganegaraan. Cina sebagai negara yang sedang gencar melakukan eksperimental, telah mendirikan Sekolah Eksperimental Abad 21 di Beijing. Praktik pendidikan dilakukan dengan menggabungkan dengan sangat baik nilai-nilai tradisional dan teknologi interaktif. Pendidikan nilai-nilai untuk membangun harga diri, kepercayaan diri, sebagai bangsa Timur yang beradab, bersanding dengan intensitas mempelajari dan mempraktekan teknologi elektronik komputer yang canggih.²⁵

²³*Ibid.*, halaman 223-227.

²⁴Deni Darmawan, *op. cit.*, halaman 405.

²⁵Gordon Dryden & Jeannette Vos, sebagaimana dikuti Ace Suryadi.. *Model Pembelajaran Alternatif Menuju Reformasi Pembelajaran (School Reform) dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan: Menyambut 70 Tahun Prof. Drs. H.A. Kosasih Djahiri* (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI, 2006), halaman 34.

Jika kita lihat perkembangan di Indonesia bahwa warga negara digital sudah eksis bahwa mereka membuat suatu deklarasi untuk dapat melindungi eksistensi mereka, yang dikenal dengan "**Deklarasi Kebebasan Internet**" yang kira-kira isinya sbb

Kami berikrar untuk Internet yang bebas dan terbuka. Kami mendukung berbagai proses yang transparan dan partisipatif guna mewujudkan kebijakan tata kelola Internet (*internet governance*), secara global pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, berdasarkan penegakan 5 (lima) prinsip dasar berikut ini: (1) **ekspresi**: Jangan sensor Internet yang bertujuan dan/atau dapat membatasi hak asasi manusia; (2) **akses**: Tingkatkan pemerataan akses universal untuk jaringan Internet yang cepat dan terjangkau; (3) **keterbukaan**: Biarkan Internet menjadi sebuah jaringan terbuka dimana semua orang secara bebas dan bertanggung-jawab dapat berkomunikasi, belajar, berkarya, dan berinovasi; (4) **inovasi**: Lindungi kebebasan berinovasi dan berkarya di Internet, jangan menghambat teknologi baru dan menghukum sang inovator karena hal-hal yang dilakukan oleh penggunanya; dan (5) **privasi**: Lindungi privasi di Internet dan pertahankan hak setiap orang untuk mengontrol bagaimana ia menggunakan data dan piranti miliknya.²⁶

Hal ini harus dicermati oleh pemerintah bahwa dengan peningkatan pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima prinsip dalam Deklarasi Kebebasan Internet yang mereka suarakan harus juga dibarengi dengan pencerdasan warga negara karena filter utama dari kebebasan informasi di internet adalah dalam diri warga negara tersebut, sehingga penguatan nilai dasar dan pembentukan karakter sebagai seorang warga negara digital harus menjadi salah satu isu pendidikan, khususnya PKn.

Karakteristik Pemerintah di Era Digital

Tidak hanya warga negara yang harus dipersiapkan, tapi pemerintah juga harus dipersiapkan untuk mengalami perubahan di era digital atau era informasi. Pemerintah diharapkan mampu melihat perubahan kondisi warga negara apalagi eksistensi warga

²⁶"Deklarasi Kebebasan Internet," dalam. <http://suarablogger.org/2012/10/01/deklarasi-kebebasan-internet/>. diakses tanggal 21 Februari 2014 pukul 7:05.

Feriyansyah: Pembentukan Karakter Warga Negara Digital

negara digital. Pemerintah di era digital harus memiliki karakteristik yang sesuai dengan kondisi di era digital.

Pemerintah harus mengubah karakteristiknya agar menjadi *good governance* di era digital. Era digital telah merubah karakteristik warga negara dalam melakukan beraktivitas kewarganegaraan, warga negara bukan lagi penerima informasi pasif. Saat ini warga negara sudah menjadi pencari informasi yang aktif dan akan menjadi produsen informasi. Pemerintah yang kaku tidak akan mampu meningkatkan keterlibatan warga negara (*civic engagement*), padahal peluang melibatkan warga negara melalui teknologi digital sangat besar.

Pola komunikasi baru itu telah menghasilkan wajah baru dari pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat lebih responsif, lebih terbuka dan cepat dalam mengambil keputusan. Keaktifan warga negara digital harus dibarengi juga dengan pemerintahan yang mau mendengar. Pemerintah tidak bisa lagi hanya secara sepihak merumuskan suatu kebijakan. Warga negara digital telah menjadi mitra utama dalam berjalannya pemerintahan. Pemerintah dan warga negara digital sudah tidak memiliki batas-batas yang menghalangi. Kerumitan birokrasi untuk sekadar berkomunikasi dengan pejabat sekarang sudah diterabas dengan kemajuan TIK. Pemerintah saat ini harus lebih terbuka kepada warga negara. *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (warga negara, pen)²⁷

Pemerintah harus mampu meningkatkan keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas kewarganegaraan yang telah berpindah ke dalam jaringan. Perpindahan aktivitas kewarganegaraan ini telah menciptakan suatu pola partisipasi baru bagi warga negara di era digital. Pada akhirnya kemajuan TIK menciptakan wajah baru pemerintah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah yang mampu memanfaatkan TIK
- 2) Pemerintahan yang dekat dengan Warga negara
- 3) Pemerintahan yang responsif terhadap berbagai aspirasi
- 4) Pemerintah yang efektif dan efisien

²⁷Hamzah Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), halaman 63.

- 5) Pemerintah yang tanggap terhadap permasalahan warga negara
- 6) Pemerintah yang terbuka
- 7) Pemerintah yang cepat mengambil keputusan

Penutup

Kemajuan TIK telah membawa perubahan dalam kehidupan kewarganegaraan khususnya praktik kewarganegaraan. Oleh karena itu, warga negara harus dipersiapkan agar mampu mengoptimalkan keuntungan dan peluang dari kemajuan TIK. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan menumbuhkan karakteristik atau kompetensi warga negara digital. Kemajuan TIK memengaruhi bagaimana warga negara berhubungan dengan pemerintah.

Pemerintah juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemerintah yang sesuai dengan perubahan pada warga negara. Warga negara dan negara menjadi terhubung setiap saat dengan kemajuan TIK. optimalisasi keuntungan dan peluang dari kemajuan bagi kehidupan kewarganegaraan melalui pembentukan karakteristik digital bagi warga negara dan pemerintah sebagai usaha meningkatkan partisipasi warga negara dalam pengelolaan negara. Pemerintah di era digital diharapkan mampu memanfaatkan TIK dekat dengan warga negara, responsif, efektif dan efisien, tanggap terhadap, terbuka, dan cepat mengambil keputusan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Azis Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Bandung: Alfabeta, 2011)

Ace Suryadi, *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Bandung: Widya Aksara Press, 2009)

David Kerr, *Citizenship Education: An International Comparison*. England: National Foundation for Educational Research-NFER, 1999)

Deni Darmawan, *Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012)

Don Tapscott, *Grown Up Digital: Yang Muda Yang Mengubah Dunia*. Diterjemahkan oleh Fajarianto (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009)

Freedy K. Karlidjernih, *Puspa Ragam, Konsep dan Isu Kewarganegaraan* (Bandung: Widya Aksara Press; Edisi ketiga, 2011)

Hamzah Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Joseph Kahne, Jacqueline Ullman, dan Middaugh, "Digital Opportunity for Civic Education," dalam David E. Campbell, et.al (Ed.), *Civic Count: Citizenship Education for a New Generation* (Cambridge, England: Harvard Education Press, 2012)

Kanred Morgan dan Medeleine Morgan, "Ethical Issues in digital information Technology," dalam Thomas Hansson (Ed.), *Handbook of Research Digital Information Technologi, Innovation and Ethical Issues* (New York, USA: Information Science Reference, 2008)

Karen Mossberger, Caroline J. Tolber and Ramona S. McNeal, *Digital Citizenship* (London: England: the MIT Press Cambridge, 2008).

M. Nu'man Somantri, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS* (Bandung: Program Pascasarjana UPI dan FPIPS UPI dengan PT Remaja Rosdakarya, 2007)

Ono W Purbo, "Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet di Indonesia," dalam *Indonesia Abad XXI: di Tengah kepingan Perubahan Global* (Jakarta: Kompas, 2010)

Ridwan Kamil, *#Tetot: Aku Kamu dan Media Sosial* (Bandung: Penerbit Sygma, 2014).

Samaun Samadikun, "Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer; Telekomunikasi dan Informasi," dalam *Indonesia Abad XXI: di Tengah Kepungan Perubahan Global* (Jakarta: Kompas, 2000)

Udin S. Winataputra. dan Dasim Budimansyah, *Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas* (Bandung: SPS UPI Bandung, 2007)

Internet

"Deklarasi Kebebasan Internet," dalam. <http://suarablogger.org/2012/10/01/deklarasi-kebebasan-internet/>. Diakses pada 21 Februari 2014 pukul 7:05.

http://www.netsafe.org.nz/Doc_Library/Digital_Citizenship_in_New_Zealand_Schools_Overview.pdf diakses pada 5 September 2013 pukul 16:06 WIB.).

http://www.netsafe.org.nz/Doc_Library/Digital_Citizenship_in_New_Zealand_Schools_Overview.pdf. Diakses pada 5 September 2013 pukul 16:06 WIB.

http://www.oaesv.org/wp-content/uploads/2013/02/Fostering_Digital_Citizenship.pdf. Diakses pada 12 Desember 2013 01:56 WIB)

http://www.oaesv.org/wp-content/uploads/2013/02/Fostering_Digital_Citizenship.pdf. Diakses pada 12 Desember 2013 01:56 WIB).